

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurahman, Soejono, H., 2003, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan kedua, Jakarta : Rineka Cipta.
- Adjie, Habib, 2008, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung : Refika Aditama.
- _____, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung : Rafika Aditama.
- _____, 2011, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Ali, Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zinal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Anwar, Ak Moch, 2001, *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : Alumni.
- Boediarto, M. Ali, 2005, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Perjanjian Perdata Setengah Abad*, Jakarta : Swa Justisia.
- Chazawi, Adami, 2002, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Donald, Teddy Evert, M. Khoidin, Ivida Dewi Amrih Suci, 2022, *Hukum Kenotariatan Prinsip Kepastian Hukum Kekuatan Mengikat Akta In Originali*, Yogyakarta : Laksbang Pustaka.
- Fuady, Munir, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Hadi, Sutrisno, 1998, *Metode Penelitian Skripsi Tesis dan Karya Ilmiah Lainnya*, Yogyakarta : Liberty.

- Hasan, M. Iqbal, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- _____, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Mustofa, 2017, *Tuntunan Pembuatan Akta-akta PPAT*, Yogyakarta : Karya Media.
- Namawi, Hadari, 1992, *Instrumen Penelitian Bidang Social*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Narsudin, Udin, 2022 *QnA Substansi Notaris dan PPAT Dalam Praktik*, Yogyakarta : Nas Media Pustaka, Yogyakarta.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2002, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka.
- Peranginangin, Effendi, 1991, *Hukum Agraria Di Indonesia: Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum/Oleh Effendi Perangin-angin*, Jakarta : Rajawali.
- Prastyo, Teguh Prastyo, *Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Rafika Aditama.
- Priyatno, Dwidja, 2017, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media.
- Pugung, Solahudin, 2021, *Perihal Tanah Dan Hukum Jual Belinya Serta Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Yang Mengandung Cacat Perpektif Negara Hukum*, Sleman : Deepublish.
- Rachmat Setiawan, 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung : Bina Cipta.
- Saleh, Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Aksara Baru.

- Salsa, Shidqi Noer, 2020, *Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Santoso, Urip, 2016, *Pejabat Pembuat AktaTanah: Perspektif Regulasi, Wewenang dan Sifat Akta*, Jakarta : Prenada Media Group.
- Sarwoto, 2006, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Siagian, Sondang P., 2016, *Filsafat Administrasi*, Jakarta : Gunung Agung.
- Sianturi, S. R., 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Alumni Ahaem-Petehaem.
- Sitorus, Oloan dan Darwinsyah Minin, 2003, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah (Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis, Disertasi)*, Yogyakarta : Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2017, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung : Mandar Maju.
- Soesilo, R., 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia.
- Subekti, R, 2005, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : PT. Pradnya Paramitha.
- Sumardjono, Maria S.W., 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta : Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- Sunggono, Bambang, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Press.
- Thamrin, Husni, 2011, *Pembuatan Akta Tanah Oleh Notaris*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- Utomo, Hatta Isnaini Wahyu, 2020, *Memahami Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Jakarta : Kencana.
- Widjaja, A.W., 2004, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Yuwono, Ismantoro Dwi, 2013, *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*, Pustaka Yustisia : Yogyakarta.

B. Tesis

Permatasari, Dita Amelia, 2015, "Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Akta Jual Beli Tanah", *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sutanto, 2006, "Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Surat bagi Notaris/PPAT karena produk akta yang dibuatnya (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor : 01/Pid.B/2001/PN.PWR Di Pengadilan Negeri Purworejo)", *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata terjemahan R. Subekti.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terjemahan R. Soesilo.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1).

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1874).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengawasan

Pejabat Pembuat Akta Tanah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 395).

D. Putusan Hakim

Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mgg

E. Internet

Eddy OS Hiariej, “Percobaan dan Pembantuan Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pembantuan dalam Delik Korupsi”, <https://www.mediaindonesia.com>, diakses melalui Internet pada tanggal 10 Juli 2024.

Sahid Raharjo, “Wawancara sebagai Metode Pengumpulan Data”, <https://www.konsistensi.com>, diakses melalui Internet pada tanggal 08 November 2023.